

## IMPLIKASI PEMBENTUKAN ATURAN ADAT DELIK NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG (NARKOBA) DALAM *PARAREM* TERHADAP KEADILAN TERPIDANA NARKOTIKA DI MASYARAKAT DESA ADAT NYUHTEBEL, KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI

Oleh:

I Nyoman Setitidana Indra Waspada\* dan Agus Sudaryanto\*\*

### INTISARI

Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan aturan adat narkotika yang tertuang dalam *pararem* di lingkup Masyarakat Desa Adat Nyuhtebel di Kabupaten Karangasem. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis implikasi keadilan dari terbentuknya aturan narkotika yang tertuang dalam *pararem* di lingkup masyarakat Desa Adat Nyuhtebel di Kabupaten Karangasem.

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari beberapa responden yaitu Pemangku Adat terkait proses pembentukan dan pelaksanaan *Pararem* Narkotika di Desa Adat Nyuhtebel serta disertai dengan narasumber yaitu ahli terkait Hukum Adat Bali dan Ahli terkait konsep keadilan restoratif. Teknik pengumpulan sampel dilakukan lewat wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif.

Berdasar penelitian yang penulis lakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Pertama, *Pararem* tentang Narkotika sampai saat ini pelaksanaannya terjadi lewat kasus delik oleh warga terpidana narkotika dengan nama samaran X di tahun 2019. Delik yang dilakukan X mendapat sanksi adat berupa a.) denda materiil/*arta danda* sejumlah uang yang setara dengan 250 kilogram beras; dan b.) denda spirituil/*sangaskara danda* berupa pelaksanaan upacara adat *Guru Pidhuka*. Kedua, implikasi yang didapat dari pembentukan dan pelaksanaan aturan *Pararem* Narkotika di kasus penjatuhan sanksi X ini ialah suatu rasa ketidakadilan dari pihak X yang didasari kesalahpahaman pemaknaan salah satu pasal yang ambigu dalam *Pararem* tentang Narkotika serta bentuk dan waktu penjatuhan sanksi hukum adat yang memberatkan.

**Kata Kunci:** Delik Adat, Hukum Adat Bali, dan Narkotika.

---

\* Mahasiswa Departemen Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

\*\* Dosen Departemen Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

**JUSTICE IMPLICATIONS FOR THE NARCOTICS CONVICT  
THROUGHTOUT THE ESTABLISHMENT OF ADAT RULES FOR  
NARCOTIC DELICT IN SHAPE OF PARAREM IN THE ADAT VILLAGE  
OF NYUHTEBEL, KARANGASEM REGENCY, BALI PROVINCE**

**By:**

**I Nyoman Setitidana Indra Waspada\* and Agus Sudaryanto\*\***

**ABSTRACT**

This research has two objectives. First, to determine the implementation of the narcotics *adat* rules contained in the shape of *Pararem* in Nyuhtebel *Adat* Village in Karangasem Regency. Second, to find out and analyze the justice implications of the establishment and implementation of narcotics delict contained in The *Pararem* in Nyuhtebel *Adat* Village in Karangasem Regency.

The research method that the author use was using empirical type and descriptive nature. The research subjects consisted of several respondents and resource experts, the respondents are *adat* stakeholders whom related to the process of forming and implementing the Narcotics *Pararem* in the Nyuhtebel *Adat* Village and the resource experts are an expert in Balinese *Adat* Law and an expert on the concept of restorative justice.

The following results were obtained based on the author's research. First, the Narcotics *Pararem* has so far been implemented through a criminal case by a narcotics convict under the pseudonym Mr. X in 2019. The offense committed by Mr. X received *adat* sanctions in the form of a.) material fines/*arta danda* in amount of money equivalent to 250 kilograms of rice, and b.) spiritual fines/*sangaskara danda* in the form of the implementation of the *Guru Pidhuka* traditional ceremony. Second, the implications obtained from the formation and implementation of the *Pararem* Narcotics in the case of Mr. X is a sense of injustice which is caused by confusingly taking the meaning due to the one ambiguous article in the Narcotics *Pararem* Rules and the form and time of imposition of aggravating *adat law* sanctions.

**Keywords:** *Adat* Law Delict, Balinese *Adat* Law, and Narcotics.

---

\* Undergraduate Student at Adat Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

\*\* Lecturer at Adat Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.